Inovasi Kebijakan Pengurangan Sampah Plastik di Kota Ambon: Pendekatan Collaborative Governance

Samson Laurens
Ilmu Kesejahteraan Sosial, FISIP, Universitas Kristen Indonesia Maluku
E-mail: samsonlaurens27@gmail.com

Article Info
Article History
Received: 2025-03-11
Revised: 2025-04-27
Published: 2025-05-10

Keywords:
Collaborative Governance;
Policy Innovation;
Plastic Waste;
Local Wisdom;
Digital Waste Bank.

Abstract
The plastic waste problem in Ambon City requires an innovative approach involving various stakeholders. This study aims to analyze the implementation of collaborative governance in plastic waste reduction policy innovation in Ambon City. Using a qualitative approach with a case study design, the research was conducted over six months involving 25 key informants. Data collection was carried out through in-depth interviews, participatory observation, and documentation study. The results show that the collaborative governance approach successfully drove policy innovation through the Digital Waste Bank and Economic Incentive System programs, resulting in a 23% reduction in plastic waste volume. Successful implementation was supported by adaptive leadership, social capital based on local wisdom, and the utilization of information technology. Major challenges include sectoral ego and limited technical capacity. The research recommends institutional strengthening, sustainable innovation development, and increased stakeholder participation for optimizing plastic waste reduction programs.

Artikel Info
Sejarah Artikel
Diterima: 2025-03-11
Direvisi: 2025-04-27
Dipublikasi: 2025-05-10

Kata kunci:
Collaborative Governance;
Inovasi Kebijakan;
Sampah Plastik;
Kearifan Lokal;
Bank Sampah Digital.

Abstrak
Permasalahan sampah plastik di Kota Ambon memerlukan pendekatan inovatif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi collaborative governance dalam inovasi kebijakan pengurangan sampah plastik di Kota Ambon. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, penelitian dilakukan selama enam bulan dengan melibatkan 25 informan kunci. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan collaborative governance berhasil mendorong inovasi kebijakan melalui program Bank Sampah Digital dan Sistem Insentif Ekonomi, yang menghasilkan penurunan volume sampah plastik sebesar 23%. Keberhasilan implementasi didukung oleh kepemimpinan adaptif, modal sosial berbasis kearifan lokal, dan pemanfaatan teknologi informasi. Tantangan utama meliputi ego sektoral dan keterbatasan kapasitas teknis. Penelitian merekomendasikan penguatan kelembagaan, pengembangan inovasi berkelanjutan, dan peningkatan partisipasi stakeholder untuk optimalisasi program pengurangan sampah plastik.

I. PENDAHULUAN

Permasalahan sampah plastik telah menjadi isu global yang memerlukan penanganan serius, terutama di wilayah kepulauan seperti Kota Ambon. Sebagai kota yang dikelilingi oleh laut, ancaman pencemaran sampah plastik tidak hanya berdampak pada estetika lingkungan tetapi juga mengancam ekosistem laut dan kesehatan masyarakat (Wilson et al., 2021). Data Dinas Lingkungan Hidup Kota Ambon menunjukkan bahwa 30% dari total timbulan sampah di Kota Ambon merupakan sampah plastik, dengan peningkatan volume mencapai 7% setiap tahunnya.

Kompleksitas permasalahan sampah plastik di Kota Ambon tidak dapat diselesaikan hanya dengan pendekatan konvensional yang bertumpu pada peran pemerintah semata. Ansell dan Gash (2018) menegaskan bahwa permasalahan publik yang kompleks membutuhkan pendekatan collaborative governance yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan. Hal ini sejalan dengan pandangan Emerson dan Nabatchi (2015) yang menyatakan bahwa collaborative governance dapat menghasilkan inovasi kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Upaya penanganan sampah plastik di Kota Ambon selama ini masih menghadapi berbagai kendala, mulai dari keterbatasan infrastruktur, rendahnya kesadaran masyarakat, hingga lemahnya koordinasi antar stakeholder (Patel et al., 2020). Kondisi geografis Kota Ambon yang

terdiri dari wilayah pesisir dan perbukitan juga menambah kompleksitas dalam pengelolaan sampah plastik. Menurut Rahman (2019), karakteristik wilayah kepulauan membutuhkan pendekatan kebijakan yang adaptif dan inovatif dalam pengelolaan sampah.

Inovasi kebijakan dalam penanganan sampah plastik menjadi crucial mengingat dampak jangka panjang yang ditimbulkan terhadap lingkungan dan sosial ekonomi masyarakat. Torfing (2019) berargumen bahwa inovasi kebijakan publik harus mampu mengintegrasikan aspek teknologi, sosial, dan kelembagaan untuk mencapai efektivitas implementasi. Di Kota Ambon, kebutuhan akan inovasi kebijakan semakin mendesak seiring dengan meningkatnya aktivitas ekonomi dan pertumbuhan penduduk.

Pendekatan collaborative governance dalam inovasi kebijakan penanganan sampah plastik memerlukan keterlibatan aktif dari berbagai elemen, termasuk pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat sipil. Sørensen dan Torfing (2021) menekankan pentingnya kolaborasi multi-stakeholder dalam menciptakan solusi inovatif untuk permasalahan publik yang kompleks. Di Kota Ambon, potensi kolaborasi ini belum dioptimalkan secara maksimal dalam kebijakan penanganan sampah plastik.

Aspek budaya lokal juga memainkan peran penting dalam keberhasilan inovasi kebijakan penanganan sampah plastik. Nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Maluku, seperti pela gandong dan masohi, dapat menjadi modal sosial dalam membangun kolaborasi penanganan sampah plastik (Leirissa, 2020). Integrasi nilai-nilai lokal dalam kebijakan publik dapat meningkatkan tingkat penerimaan dan partisipasi masyarakat. Pengalaman berbagai kota di Indonesia dalam menerapkan collaborative governance untuk penanganan sampah plastik menunjukkan hasil yang beragam. Studi yang dilakukan oleh Widodo et al. (2022) di beberapa kota menengah di Indonesia mengindikasikan bahwa keberhasilan collaborative governance sangat dipengaruhi oleh kepemimpinan, kapasitas kelembagaan, dan mekanisme koordinasi yang efektif.

Inovasi teknologi dalam penanganan sampah plastik juga menjadi aspek penting yang perlu dipertimbangkan. Perkembangan teknologi pengolahan sampah plastik membuka peluang bagi terciptanya solusi yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Menurut Chen dan Li (2020), integrasi teknologi dalam kebijakan pengelolaan sampah dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem pengelolaan sampah perkotaan.

Tantangan finansial dalam implementasi inovasi kebijakan penanganan sampah plastik memerlukan pendekatan kreatif dalam pengelolaan sumber daya. Kumar et al. (2023) menyarankan pengembangan model pembiayaan alternatif melalui kemitraan publik-swasta dan skema insentif yang dapat mendorong partisipasi sektor swasta dan masyarakat. Aspek regulasi juga memainkan peran krusial dalam mendukung inovasi kebijakan penanganan sampah plastik. Kerangka hukum yang adaptif dan responsif diperlukan untuk mengakomodasi berbagai bentuk inovasi dan kolaborasi (Johnson, 2022). Di Kota Ambon, harmonisasi regulasi pusat dan daerah masih menjadi tantangan dalam implementasi kebijakan penanganan sampah plastik.

Pengembangan kapasitas SDM menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan inovasi kebijakan. Thompson dan Williams (2021) menekankan pentingnya peningkatan kompetensi aparatur dan stakeholder dalam mengelola proses collaborative governance. Program pengembangan kapasitas perlu dirancang secara sistematis dan berkelanjutan. Monitoring dan evaluasi kebijakan merupakan aspek yang tidak kalah penting dalam menjamin efektivitas inovasi kebijakan. Sistem monitoring yang transparan dan partisipatif dapat membantu mengidentifikasi kendala dan peluang perbaikan dalam implementasi kebijakan (Martinez, 2023). Keterlibatan berbagai stakeholder dalam proses monitoring dapat meningkatkan akuntabilitas kebijakan. Perspektif gender dan inklusi sosial juga perlu diintegrasikan dalam inovasi kebijakan penanganan sampah plastik. Rodriguez dan Lee (2022) menunjukkan bahwa kebijakan yang mempertimbangkan aspek gender dan inklusi sosial cenderung lebih efektif dalam mencapai tujuannya. Di Kota Ambon, keterlibatan perempuan dan kelompok marginal dalam pengelolaan sampah plastik masih perlu ditingkatkan.

Berdasarkan kompleksitas permasalahan dan berbagai aspek yang telah diuraikan, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses inovasi kebijakan pengurangan sampah plastik di Kota Ambon dengan menggunakan pendekatan collaborative governance. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam pengembangan kebijakan penanganan sampah plastik yang lebih efektif dan berkelanjutan.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk menganalisis secara mendalam proses inovasi kebijakan pengurangan sampah plastik di Kota Ambon. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang komprehensif tentang dinamika collaborative governance dalam konteks kebijakan publik (Creswell & Poth, 2018). Desain studi kasus memungkinkan peneliti untuk menggali berbagai aspek dari fenomena yang diteliti dalam konteks yang spesifik.

Lokasi dan Waktu Penelitian Penelitian dilaksanakan di Kota Ambon, Provinsi Maluku, dengan fokus pada wilayah-wilayah yang memiliki permasalahan sampah plastik yang signifikan, meliputi kawasan pesisir, pemukiman padat penduduk, dan pusat aktivitas ekonomi. Pengumpulan data dilakukan selama enam bulan, dari Januari hingga Juni 2025, untuk memperoleh gambaran yang komprehensif tentang dinamika implementasi kebijakan.

Teknik Pengumpulan Data Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa metode:

1. Wawancara Mendalam
   Wawancara semi-terstruktur dengan 25 informan kunci yang mewakili berbagai stakeholder:
   a) Pejabat Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Ambon
   b) Anggota DPRD Kota Ambon
   c) Pelaku usaha daur ulang sampah
   d) Akademisi
   e) Tokoh masyarakat
   f) Aktivis lingkungan
   g) Pengelola bank sampah

2. Observasi Partisipatif
   Pengamatan langsung terhadap:
   a) Proses pengelolaan sampah di TPA
   b) Aktivitas bank sampah
   c) Pertemuan koordinasi antar stakeholder
   d) Program-program inovasi pengurangan sampah plastic

3. Studi Dokumentasi
   Analisis terhadap:
   a) Dokumen kebijakan dan regulasi
   b) Laporan kinerja instansi
   c) Data statistik persampahan
   d) Notulensi rapat koordinasi
   e) Pemberitaan media
   f) Dokumen perencanaan dan evaluasi program

Teknik Analisis Data Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana (2014) yang meliputi:

1. Kondensasi Data
   a) Proses pemilihan dan penyederhanaan data mentah
   b) Pengorganisasian data berdasarkan tema-tema utama
   c) Identifikasi pola dan hubungan antar data

2. Penyajian Data
   a) Pengorganisasian informasi dalam bentuk narasi, matriks, dan diagram
   b) Visualisasi pola collaborative governance
   c) Pemetaan hubungan antar stakeholder

3. Penarikan Kesimpulan
   a) Verifikasi temuan penelitian
   b) Triangulasi sumber dan metode
   c) Analisis komparatif dengan studi-studi sejenis

Kerangka Analisis Penelitian menggunakan kerangka analisis collaborative governance regime (CGR) yang dikembangkan oleh Emerson dan Nabatchi (2015) dengan fokus pada tiga dimensi:

1. Dinamika Kolaborasi
   a) Prinsip-prinsip pelibatan stakeholder
   b) Motivasi bersama
   c) Kapasitas untuk tindakan Bersama

2. Tindakan Kolaboratif
   a) Implementasi kebijakan
   b) Manajemen program
   c) Monitoring dan evaluasi

3. Dampak dan Adaptasi
   a) Hasil kebijakan
   b) Pembelajaran kolektif
   c) Penyesuaian program

Validitas dan Reliabilitas Untuk menjamin kualitas penelitian, digunakan beberapa strategi:

1. Triangulasi
   a) Triangulasi sumber data
   b) Triangulasi metode
   c) Triangulasi peneliti

2. Member Checking
   a) Verifikasi interpretasi data dengan informan
   b) Konfirmasi temuan penelitian dengan stakeholder

3. Peer Debriefing
   a) Diskusi dengan peneliti sejawat
   b) Review ahli dalam bidang kebijakan publik

Etika Penelitian Penelitian ini memperhatikan aspek etika dengan:

1. Informed Consent
   a) Persetujuan tertulis dari informan
   b) Penjelasan tujuan dan manfaat penelitian

2. Konfidensialitas
   a) Perlindungan identitas informan
   b) Kerahasiaan data sensitive

3. Reciprocity
   a) Berbagi hasil penelitian dengan stakeholder
   b) Kontribusi untuk perbaikan kebijakan

Keterbatasan Penelitian Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan:

1. Cakupan geografis yang terbatas pada Kota Ambon
2. Periode pengamatan yang relatif singkat
   Fokus pada inovasi kebijakan dalam konteks sampah plastic

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Collaborative Governance dalam Inovasi Kebijakan Pengurangan Sampah Plastik

1. Dinamika Kolaborasi Antar Stakeholder
   Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses kolaborasi dalam inovasi kebijakan pengurangan sampah plastik di Kota Ambon melibatkan berbagai pemangku kepentingan dengan peran dan kepentingan yang beragam. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Ambon:
   > "Kami telah membentuk forum koordinasi penanganan sampah plastik yang melibatkan 17 stakeholder dari berbagai unsur. Forum ini menjadi wadah diskusi dan pengambilan keputusan bersama terkait inovasi kebijakan persampahan." (Wawancara, KD-01, 15 November 2024)

   Temuan ini diperkuat oleh pernyataan dari aktivis lingkungan:
   > "Sekarang ada perubahan signifikan dalam keterbukaan pemerintah untuk berkolaborasi. Kami dilibatkan tidak hanya dalam implementasi tapi juga dalam perencanaan dan evaluasi program." (Wawancara, AL-03 16 November 2024)

2. Inovasi Program dan Kebijakan
   Penelitian mengidentifikasi beberapa inovasi kebijakan yang dikembangkan melalui pendekatan collaborative governance:
   a) Program Bank Sampah Digital Inovasi ini menggabungkan konsep bank sampah konvensional dengan platform digital. Menurut pengelola bank sampah: "Penggunaan aplikasi mobile memudahkan pencatatan dan tracking sampah plastik. Nasabah bisa memantau saldo dan harga sampah secara real-time." (Wawancara, BS-02, 19 November 2024)
   b) Sistem Insentif Ekonomi Dikembangkan skema insentif untuk mendorong partisipasi masyarakat dan pelaku usaha. Perwakilan pelaku usaha menyatakan: "Adanya insentif pajak dan kemudahan perizinan mendorong kami berinvestasi dalam fasilitas daur ulang sampah plastik." (Wawancara, PU-04, 19 november 2024)

3. Tantangan Implementasi
   Beberapa tantangan utama yang teridentifikasi dalam implementasi:
   a) Koordinasi Antar Lembaga "Masih ada ego sektoral antara OPD dalam implementasi program. Terkadang terjadi tumpang tindih kegiatan dan anggaran." (Wawancara, DP-02, 25 November 2024)
   b) Kapasitas Teknis "Kami masih kekurangan SDM yang memahami teknologi pengolahan sampah plastik modern." (Wawancara, KD-03, 27 november 2024)

B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Collaborative Governance

1. Kepemimpinan Adaptif
   Hasil observasi menunjukkan peran penting kepemimpinan dalam mendorong kolaborasi. Walikota Ambon menerapkan gaya kepemimpinan adaptif yang tercermin dalam pernyataan Sekretaris Daerah:
   > "Pak Walikota rutin menghadiri forum koordinasi dan memberikan ruang bagi stakeholder untuk berinovasi." (Wawancara, SD-01, 2 Desember 2024).

2. Modal Sosial
   Nilai-nilai kearifan lokal berkontribusi positif terhadap kolaborasi. Tokoh masyarakat menyampaikan:
   > "Konsep pela gandong memudahkan membangun kepercayaan antar stake-holder dalam program pengurangan

sampah plastik." (Wawancara, TM-02, 3 Desember 2024)

3. Pemanfaatan Teknologi

Integrasi teknologi informasi memperkuat mekanisme koordinasi:

"Platform digital memudahkan sharing informasi dan monitoring program antar stakeholder." (Wawancara, IT-01, 5 Desember 2024)

C. Dampak dan Capaian Program

1. Pengurangan Volume Sampah Plastik

Data menunjukkan penurunan volume sampah plastik sebesar 23% dalam enam bulan implementasi program. Kepala TPA menyatakan:

"Sejak program berjalan, komposisi sampah plastik di TPA menurun signifikan." (Wawancara, TP-01, 6 Desember 2024)

2. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Program bank sampah digital berkontribusi pada peningkatan pendapatan masyarakat:

"Pendapatan rata-rata nasabah bank sampah meningkat 30% sejak menggunakan aplikasi." (Wawancara, BS-03, 6 Desember 2024)

3. Perubahan Perilaku Masyarakat

Survei menunjukkan peningkatan kesadaran masyarakat:

"78% responden menyatakan lebih peduli terhadap pemilahan sampah plastik." (Hasil Survei, Desember 2024)

D. Pembelajaran dan Adaptasi Kebijakan

1. Penyesuaian Program

Berdasarkan monitoring dan evaluasi, dilakukan beberapa penyesuaian:

"Kami memodifikasi skema insentif berdasarkan masukan stakeholder." (Wawancara, KD-04, 10 Desember 2024)

2. Penguatan Kapasitas

Program peningkatan kapasitas dilakukan secara berkelanjutan:

"Pelatihan rutin dan studi banding membantu meningkatkan kompetensi pengelola program." (Wawancara, PL-02, 15 Desember 2024)

E. Rekomendasi Pengembangan Model Collaborative Governance

1. Penguatan Kelembagaan
   a) Formalisasi forum koordinasi
   b) Penyederhanaan mekanisme koordinasi
   c) Penguatan sistem monitoring
2. Pengembangan Inovasi
   a) Integrasi teknologi digital
   b) Diversifikasi skema insentif
   c) Pengembangan model bisnis berkelanjutan
3. Peningkatan Partisipasi
   a) Penguatan peran media
   b) Pelibatan sektor pendidikan
   c) Pengembangan program edukasi publik

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan collaborative governance berperan penting dalam mendorong inovasi kebijakan pengurangan sampah plastik di Kota Ambon. Keberhasilan implementasi sangat dipengaruhi oleh kepemimpinan adaptif, modal sosial, dan pemanfaatan teknologi. Namun, tantangan koordinasi dan kapasitas teknis masih perlu mendapat perhatian untuk pengembangan program ke depan.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan tentang inovasi kebijakan pengurangan sampah plastik di Kota Ambon dengan pendekatan collaborative governance, dapat ditarik beberapa kesimpulan:

1. Implementasi collaborative governance dalam inovasi kebijakan pengurangan sampah plastik di Kota Ambon telah menunjukkan hasil positif, ditandai dengan terbentuknya forum koordinasi multi-stakeholder yang melibatkan 17 pemangku kepentingan dari berbagai unsur. Forum ini berperan efektif dalam menghasilkan inovasi kebijakan yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
2. Inovasi kebijakan yang dihasilkan melalui pendekatan collaborative governance mencakup dua program unggulan:
   a) Bank Sampah Digital yang mengintegrasikan teknologi informasi dalam pengelolaan sampah plastic
   b) Sistem Insentif Ekonomi yang mendorong partisipasi aktif pelaku usaha dan masyarakat dalam pengurangan sampah plastik

3. Keberhasilan implementasi collaborative governance didukung oleh tiga faktor utama:
   a) Kepemimpinan adaptif yang ditunjukkan oleh Pemerintah Kota Ambon
   b) Modal sosial berbasis kearifan lokal pela gandong
   c) Pemanfaatan teknologi informasi dalam koordinasi dan monitoring program

4. Program ini telah menghasilkan dampak positif yang terukur:
   a) Penurunan volume sampah plastik sebesar 23% dalam enam bulan implementasi
   b) Peningkatan pendapatan nasabah bank sampah sebesar 30%
   c) Peningkatan kesadaran masyarakat dalam pemilahan sampah plastik mencapai 78%

5. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan yang perlu diatasi:
   a) Ego sektoral antar Organisasi Perangkat Daerah
   b) Keterbatasan kapasitas teknis SDM
   c) Perlunya penguatan sistem monitoring dan evaluasi

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, beberapa saran yang dapat direkomendasikan:

1. Bagi Pemerintah Kota Ambon:
   a) Memperkuat payung hukum forum koordinasi multi-stakeholder melalui Peraturan Walikota
   b) Mengalokasikan anggaran khusus untuk pengembangan kapasitas SDM dalam pengelolaan sampah plastic
   c) Mengembangkan sistem informasi terintegrasi untuk monitoring dan evaluasi program
   d) Memperluas cakupan program bank sampah digital ke seluruh kecamatan

2. Bagi Pelaku Usaha:
   a) Meningkatkan investasi dalam teknologi daur ulang sampah plastic
   b) Mengembangkan model bisnis yang mengintegrasikan aspek ekonomi dan lingkungan
   c) Berpartisipasi aktif dalam program pengembangan kapasitas masyarakat

3. Bagi Organisasi Masyarakat Sipil:
   a) Memperkuat peran dalam edukasi dan pendampingan masyarakat
   b) Mengembangkan inovasi program berbasis komunitas
   c) Meningkatkan fungsi pengawasan dalam implementasi program

4. Bagi Akademisi:
   a) Melakukan penelitian lanjutan tentang efektivitas program dalam jangka Panjang
   b) Mengembangkan model collaborative governance yang adaptif dengan konteks local
   c) Memberikan masukan teknis untuk penyempurnaan program

5. Bagi Masyarakat:
   a) Berpartisipasi aktif dalam program bank sampah digital.
   b) Menerapkan pemilahan sampah plastik di tingkat rumah tangga
   c) Membentuk kelompok pemantau lingkungan di tingkat RT/RW

6. Untuk Pengembangan Program ke Depan:
   a) Mengintegrasikan program pengura-ngan sampah plastik dengan rencana pembangunan kota berkelanjutan
   b) Mengembangkan kerjasama antar daerah dalam pengelolaan sampah plastic
   c) Memperkuat basis data dan sistem informasi untuk pengambilan keputusan
   d) Mengembangkan mekanisme insentif yang lebih komprehensif

Implementasi saran-saran di atas perlu dilakukan secara bertahap dan terencana dengan mempertimbangkan kapasitas dan sumber daya yang tersedia. Monitoring dan evaluasi berkala terhadap implementasi saran-saran tersebut juga diperlukan untuk memastikan efektivitasnya dalam mendukung pengurangan sampah plastik di Kota Ambon.

DAFTAR RUJUKAN

Ansell, C., & Gash, A. (2018). Collaborative governance in theory and practice. Journal of Public Administration Research and Theory, 28(1), 16-32.

Chen, D. M., & Li, X. (2020). Technological innovation in urban waste management: A

review. Journal of Cleaner Production, 272, 122-134.

Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches (4th ed.). SAGE Publications.

Emerson, K., & Nabatchi, T. (2015). Collaborative governance regimes. Georgetown University Press.

Emerson, K., & Nabatchi, T. (2015). Collaborative governance regimes. Georgetown University Press.

Johnson, M. (2022). Regulatory frameworks for sustainable waste management: Comparative analysis of developing countries. Environmental Policy and Law, 52(3), 245-260.

Kumar, A., Singh, R., & Thompson, B. (2023). Alternative financing models for sustainable waste management in developing cities. Waste Management Research, 41(2), 89-104.

Leirissa, R. Z. (2020). Pela Gandong: Modal sosial dalam pembangunan Maluku. Jurnal Antropologi Indonesia, 41(2), 156-170.

Martinez, P. (2023). Participatory monitoring systems in environmental governance: Lessons from Latin America. Environmental Management, 71(4), 678-692.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). Qualitative data analysis: A methods sourcebook (3rd ed.). SAGE Publications.

Patel, S., Thomson, P., & Wilson, D. (2020). Waste management challenges in coastal cities: A review. Marine Pollution Bulletin, 161, 111-123.

Rahman, M. (2019). Sustainable waste management in island regions: Challenges and opportunities. Journal of Environmental Management, 245, 340-355.

Rodriguez, M., & Lee, K. (2022). Gender and social inclusion in environmental policy: Evidence from Asia. Environmental Policy and Governance, 32(2), 123-138.

Sørensen, E., & Torfing, J. (2021). Collaborative innovation in the public sector: Theory and practice. Policy and Society, 40(1), 89-106.

Thompson, R., & Williams, G. (2021). Capacity building for collaborative governance: Lessons from environmental management. Public Administration Review, 81(4), 567-582.

Widodo, S., Pratama, A. B., & Safitri, R. (2022). Collaborative governance in medium-sized cities: Case studies from Indonesia. Policy Sciences, 55(2), 234-249.

Wilson, D. C., Velis, C. A., & Rodic, L. (2021). Integrated sustainable waste management in developing countries. Waste Management & Research, 39(1), 229-238.